

BERBAGAI PANDANGAN MENGENAI GENDER DAN FEMINISME

Oleh :

Fajar Apriani, S.Sos., M.Si. *)

Abstrak

`Gender` got a big attention in Indonesia. In another word, gender have become `a big industry` in contemporer Indonesian social history. But, how exactly the perception about women in theoritical analysis ? In this two decade, a paradigm changing process happen through a long debate in feminism movement, between opinion that focus on women problems and opinion that focus on system and people structur which based on gender analysis.

From a lot of cases about men and women inequalities relationship, there is an analysis that ask about social inequalities from sex relation aspect, that known as gender analysis which is instrument analysis that use to understand about social reality. Besides, gender analysis help us to understand that the point of the problem is the unfair system and structur, where men and women being victims and got dehumanisation because of gender inequalities. Women got dehumanisation because of gender inequalities, while men got dehumanisation because support gender inequalities.

*) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

A. Konsep Gender dan Sex (Jenis Kelamin)

Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan gender dan mengapa gender selalu dikaitkan dengan usaha emansipasi kaum perempuan ? Untuk itu diperlukan penjelasan mengenai konsep gender.

Istilah gender sesungguhnya tidak ada dalam bahasa Indonesia. Dan dalam kamus bahasa Inggris, kata “gender” dan “sex” diartikan sebagai jenis kelamin. Sehingga perlu diuraikan dengan jelas tentang kaitan antara konsep gender dengan sistem ketidakadilan sosial secara luas, kaitan antara konsep gender dengan kaum perempuan, dan hubungannya dengan persoalan ketidakadilan sosial lainnya.

Pemahaman mengenai gender pada hakekatnya adalah pemahaman yang pekat dengan nuansa barat (*western invention* – Connell, 1993). Konsep gender

kemudian diadopsi oleh Indonesia karena masyarakat Indonesia modern kurang memperhatikan esensi kebudayaan lokal mengenai dinamika relasi-relasi seksual.

Gender sebagai suatu konsep bertumpu pada aspek biologis (*biological reductionism*) sebagaimana dikatakan oleh Cucchiari (1994) bahwa gender memiliki dua kategori biologis yang berbeda namun saling mengisi, yaitu pertama kategori laki-laki dan yang kedua adalah kategori perempuan. Setiap kategori mengandung makna yang pengertiannya bervariasi dari satu ke lain masyarakat. Setiap aktivitas, sikap, tata nilai dan simbol-simbol diberi makna oleh masyarakat pendukungnya menurut kategori biologis masing-masing.

Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Dalam arti perbedaan jenis kelamin, seks mengandung pengertian laki-laki dan perempuan terpisah secara biologis, yang berarti perempuan memiliki hormon, postur tubuh dan alat reproduksi yang berbeda dengan laki-laki. Secara biologis alat-alat biologis tersebut melekat pada lelaki dan perempuan selamanya, fungsinya tidak dapat dipertukarkan, secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologi atau Tuhan / kodrat (dalam Handayani, 2006 : 4).

Sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Bentuk sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain : kalau perempuan dikenal

sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sifat-sifat itu dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (dalam Handayani, 2006 : 5).

Perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Banyak mitos dan kepercayaan yang menjadikan kedudukan perempuan berada lebih rendah daripada laki-laki. Hal itu semata-mata karena perempuan dipandang dari segi seks, bukan dari segi kemampuan, kesempatan dan aspek-aspek manusiawi secara universal, yaitu sebagai manusia yang berakal, bernalar dan berperasaan.

Untuk memperjelas konsep seks dan gender, Unger (dalam Handayani, 2006 : 6) mengemukakan beberapa perbedaan :

1) Sumber pembeda

Seks bersumber dari Tuhan (kodrati), sedangkan sumber pembeda gender adalah manusia (masyarakat).

2) Visi dan misi

Visi dan misi seks adalah kesetaraan, sedangkan visi dan misi gender adalah kebiasaan.

3) Unsur pembeda

Unsur pembeda seks adalah alat reproduksi (biologis), sedangkan unsur pembeda gender adalah kebudayaan (tingkah laku).

4) Sifat

Seks bersifat kodrat, tertentu dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender bersifat harkat, martabat dan dapat dipertukarkan.

5) Dampak

Seks membawa dampak berupa terciptanya nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dan sebagainya, sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan gender membawa dampak terciptanya ketentuan tentang “pantas” atau “tidak pantas”, misalnya laki-laki pantas menjadi pemimpin dan perempuan pantas dipimpin. Sehingga sering merugikan salah satu pihak, yaitu perempuan.

6) Keberlakuan

Seks berlaku sepanjang masa dan dimana saja, serta tidak mengenal pembedaan kelas. Sedangkan gender dapat berubah, musiman dan berbeda antar kelas.

B. Implementasi Ketidaksetaraan

Sejarah perbedaan antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan dan konstruksi sosial kultural, keagamaan, bahkan melalui kekuasaan negara. Melalui proses yang panjang, gender lambat laun menjadi seolah-olah kodrat Tuhan atau ketentuan biologis yang tidak dapat diubah lagi. Akibatnya, gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat

tentang bagaimana lelaki dan perempuan berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Pembedaan yang dilakukan oleh aturan masyarakat dan bukan perbedaan biologis itu dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Masyarakat sebagai kelompoklah yang menciptakan perilaku pembagian gender untuk menentukan berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai keharusan, untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keyakinan pembagian itu selanjutnya diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, penuh dengan proses, negosiasi, restensi maupun dominasi. Akhirnya lama kelamaan pembagian keyakinan gender tersebut dianggap alamiah, normal dan kodrat sehingga bagi mereka yang mulai melanggar dianggap tidak normal dan melanggar kodrat. Oleh karena itu diantara bangsa-bangsa dalam kurun waktu yang berbeda, pembagian gender tersebut berbeda-beda.

C. Kedudukan Perempuan dari Berbagai Sudut Pandang

1) Perspektif Ekonomi

Dalam kacamata ekonomi, subordinasi kedudukan perempuan yang berada di bawah laki-laki berakar pada ketergantungan ekonomi. Charlotte P. Gilman, dalam salah satu tulisannya yang berjudul *Women and Economic*, 1898 (dalam Hollinger dan Capper, 2001 : 46) mengatakan bahwa apabila seorang perempuan kehilangan aktivitas ekonomi dan mengubahnya secara keseluruhan menjadi seks, menjadi semata-mata “kantong telur”, sebuah organisme tanpa daya untuk mempertahankan ras”. Artinya Gilman berargumantasi bahwa sesungguhnya status sekunder perempuan berdasar lebih pada masalah ekonomi daripada sosial dan budaya. Hal ini berarti bahwa

dalam suatu masyarakat dengan budaya tertentu, apabila seorang perempuan secara ekonomi dominan terhadap laki-laki, maka ia dapat memegang kedudukan yang superior terhadap laki-laki.

Lebih lanjut Gilman mengatakan bahwa ketika laki-laki mulai memberi makan dan melindungi perempuan, perempuan secara proporsional berhenti memberi makan dan melindungi dirinya sendiri. Artinya, mengacu pada pernyataan tersebut, apabila perempuan menurunkan kemampuan mereka untuk menghidupi dan memelihara diri sendiri, maka mereka akan tergantung pada laki-laki. Sebagai konsekuensi atas keadaan yang demikian, seorang perempuan harus menyenangkan “majikan”nya sebagai timbale balik atas kepatuhan dan kepasrahannya pada “majikan”nya.

Karena kekuasaan dapat diperoleh melalui kepemilikan properti, maka perempuan tidak memiliki kekuatan hukum, mengingat perempuan tidak mempunyai akses yang kuat atas properti, apabila dibandingkan dengan laki-laki. Sebagai gambaran, dalam sistem hukum Inggris lama, seorang perempuan yang menikah akan diberi gelar *feme covert* (perempuan yang terlindungi), dimana ia mempunyai kemandirian hukum, ia tidak dapat menguasai properti atau menandatangani kontrak, dan ia bahkan tidak memiliki hak pada penghasilan yang diperolehnya. Keberadaannya secara hukum lebur dengan keberadaan suaminya. Status ini sejalan dengan status *feme sole* (perempuan single) yang diterapkan pada perempuan lajang yang berusia lebih dari dua puluh satu tahun dan juga pada janda. Di bawah status *feme sole*, perempuan memiliki hak untuk menandatangani kontrak dan

menguasai properti atas namanya sendiri, dan janda memperoleh hak-hak hukum sebagai perwakilan dari mendiang suaminya (Sara M. Evans, 1994 : 29-30).

Keadaan ini menimbulkan suatu situasi dimana kesatuan hubungan laki-laki dan perempuan, sebagai pasangan yang saling melengkapi, mengalami penurunan arti dan dipaksa masuk ke dalam suatu kondisi yang “apakah – atau”, yaitu apakah perempuan menikah dan kehilangan eksistensi diri, atau tetap melajang namun mempertahankan eksistensi dirinya. Kondisi ini sangat dilematis baik bagi laki-laki maupun perempuan, karena hal ini mengandung ide yang bertentangan dengan hukum alam atas persekutuan laki-laki dan perempuan, padahal sesungguhnya mereka pada dasarnya saling membutuhkan.

2) Perspektif Politis

Menurut Milton Friedman (1982 : 8), terdapat suatu hubungan yang kuat antara kebebasan ekonomi dan kebebasan politis. Secara gamblang ia menjelaskan bahwa tatanan ekonomi memainkan peran ganda dalam mempromosikan suatu masyarakat yang bebas. Di pihak lain, kebebasan dalam tatanan ekonomi adalah merupakan komponen kebebasan yang dimengerti secara luas, jadi kebebasan ekonomi adalah tujuan itu sendiri. Pada bagian kedua, kebebasan ekonomi adalah sarana yang sangat dibutuhkan bagi tercapainya kebebasan politik.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa karena seorang perempuan tidak memiliki kebebasan ekonomi karena secara ekonomi

ia tergantung pada suaminya, maka ia tidak memiliki kebebasan politis. Atau dengan kata lain, karena perempuan tidak memiliki kendali atas properti dan alat produksi, maka perempuan tidak memiliki akses untuk berpartisipasi dalam ranah politik.

Diane Elson dalam artikelnya yang berjudul *Structural Adjustment : Its Effect on Women*, 1989 (1991 : 42) mengatakan bahwa hubungan antara perempuan, pasar dan negara adalah kompleks. Negara tidak selalu berjalan sesuai minat perempuan, dan pasar tidak selalu berjalan berlawanan dengan kepentingan perempuan.

Kompleksitas dalam hubungan segitiga antara perempuan, pasar dan negara ini dapat membawa rintangan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam lingkup politik. Hal ini disebabkan oleh adanya pertimbangan bahwa perempuan tidak mandiri secara ekonomis, oleh karenanya perempuan tidak layak untuk memperoleh akses pada sumber daya, seperti yang diperoleh laki-laki. Dengan demikian, perempuan akan kehilangan posisi tawar mereka dalam dunia politik apabila secara ekonomis perempuan tergantung pada pihak lain.

3) Perspektif Budaya

Margaret L. Anderson (1983 : 47) mendefinisikan budaya sebagai sebuah pola harapan tentang perilaku dan kepercayaan pada apa yang pantas bagi anggota masyarakat. Oleh karena itu, budaya menyediakan resep-resep bagi perilaku sosial. Budaya mengatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang

harus kita pikirkan, kita harus menjadi apa, dan apa yang harus kita harapkan dari orang lain.

Lionel Tiger dan Robin Fox (dalam Haralambos dan Heald, 1980 : 370) mengajukan teori yang menyatakan bahwa karakteristik berkenaan dengan seks, dimana pembagian peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh apa yang disebut "*biogrammar*", susunan hayati. Menurut teori ini, laki-laki cenderung lebih agresif dan dominan apabila dibandingkan dengan perempuan yang berurusan dengan reproduksi dan pemeliharaan anak. Mereka mengatakan bahwa biogrammar mengalami penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berburu, termasuk di dalamnya pembagian kerja yang berdasarkan karakteristik seksual.

Mengenai hal ini, Haralambos dan Heald (1980 : 373) menyimpulkan bahwa norma, nilai dan peran ditentukan secara kultural dan disampaikan secara sosial. Dari sudut pandang ini, peran gender adalah sebuah produk budaya daripada produk biologi. Individu mempelajari masing-masing peran laki-laki maupun perempuan. Pembagian kerja yang berdasarkan jenis kelamin didukung dan dibenarkan oleh sistem kepercayaan dan nilai yang menyatakan bahwa peran gender adalah normal, alami, benar dan layak.

Karena budaya Indonesia secara kental dipengaruhi oleh etika agama Islam akibat penduduknya didominasi oleh penganut agama Islam, dengan demikian kedudukan dan peran perempuan juga turut terbentuk dengan mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.

D. Tipe-tipe Feminisme

Rosemarie Putnam Tong (dalam Arivia, 2003 : 84) mengemukakan tiga gelombang feminisme. Menurut Tong, gelombang pertama dimulai pada sekitar tahun 1800-an, dan merupakan dasar bagi gerakan-gerakan perempuan berikutnya. Pada fase ini, para perempuan sibuk sebagai aktifis gerakan perempuan. Gelombang kedua berkembang di tahun 1960-an, yang ditandai dengan pencarian representasi citra perempuan dan kedudukan perempuan oleh kaum feminis. Pada masa inilah teori mengenai kesetaraan perempuan mulai tumbuh. Gelombang ketiga ditengarai dengan pengkolaborasi teori mengenai kesetaraan perempuan dengan pemikiran kontemporer, yang kemudian melahirkan teori feminis yang beraneka ragam.

Menurut Gerda Lerner (1986 : 236), terdapat beberapa definisi mengenai istilah feminisme. Diantaranya, (a) feminisme adalah sebuah doktrin yang menyokong hak-hak sosial dan politik yang setara bagi perempuan; (b) menyusun suatu deklarasi perempuan sebagai sebuah kelompok dan sejumlah teori yang telah diciptakan oleh perempuan; (c) kepercayaan pada perlunya perubahan sosial yang luas yang berfungsi untuk meningkatkan daya perempuan.

Lebih lanjut Lerner (1986 : 235 – 237) mengemukakan bahwa feminisme dapat mencakup baik gerakan hak-hak perempuan maupun emansipasi perempuan. Ia mendefinisikan kedua posisi tersebut sebagai gerakan hak-hak perempuan berarti sebuah gerakan yang peduli dengan kemenangan bagi kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam semua aspek masyarakat dan memberi mereka akses pada semua hak-hak dan kesempatan-kesempatan yang dinikmati laki-laki dalam institusi-institusi dari masyarakat tersebut. Oleh karena

itu, gerakan hak-hak perempuan serupa dengan gerakan hak-hak sipil dalam menginginkan partisipasi setara bagi perempuan dalam status *quo*, pada dasarnya tujuan seorang reformis. Gerakan hak-hak perempuan dan hak pilih bagi perempuan adalah contohnya.

Sehingga dengan demikian, istilah emansipasi perempuan berarti bebas dari pembatasan yang menindas yang dikenakan oleh seks, penentuan diri dan otonomi. Bebas dari pembatasan yang menindas yang dikenakan oleh seks berarti bebas dari pembatasan biologis dan kemasyarakatan. Penentuan diri berarti seseorang bebas untuk memutuskan nasibnya sendiri, bebas untuk mendefinisikan peran sosial seseorang, memiliki kebebasan untuk membuat keputusan berkenaan dengan tubuh seseorang. Otonomi berarti seseorang mendapatkan statusnya sendiri, tidak dilahirkan ke dalamnya atau menikahinya, sehingga berarti juga kemandirian finansial, bebas untuk memilih gaya hidup, yang semuanya secara tidak langsung berarti sebuah transformasi radikal dari lembaga-lembaga, nilai-nilai dan teori-teori yang ada.

Seiring perjalanan waktu, timbul berbagai macam aliran feminisme (dalam Nope, 2005 : 68 – 101), sebagai berikut :

1) Feminisme Liberal

Alison Jaggar dalam tulisannya yang berjudul *On Sexual Equality* (dalam Arivia, 2003 : 93-109) menyatakan bahwa kaum liberalis mendefinisikan rasionalitas ke dalam berbagai aspek termasuk moralitas dan kearifan. Apabila penalaran diterjemahkan sebagai sebuah kemampuan untuk memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka pemenuhan diri hadir.

Dengan demikian, sebagai konsekuensinya, liberalisme menekankan bahwa setiap individu dapat mempraktekkan otonominya. Kaum liberalis dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu liberalis klasik dan liberalis egaliterian.

Liberalis klasik mengharapkan perlindungan negara dalam hal kebebasan sipil, seperti hak kepemilikan, hak untuk memilih, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk memeluk suatu agama, dan hak untuk berorganisasi. Sedangkan mengenai isu pasar bebas, liberalis klasik menghendaki agar setiap individu diberi kesempatan yang sama untuk mencari keuntungan. Di pihak lain, kaum liberalis egaliterian mengusulkan bahwa idealnya negara seharusnya hanya berfokus pada keadilan ekonomi dan bukan pada kebebasan sipil. Menurut paham ini, setiap individu memasuki pasar dengan terlebih dahulu memiliki modal, misalnya materi ataupun koneksi, talenta dan juga keberuntungan.

Feminisme liberal melandaskan idealisme fundamentalnya pada pemikiran bahwa manusia bersifat otonomi dan diarahkan oleh penalaran yang menjadikan manusia mengerti akan prinsip-prinsip moralitas dan kebebasan individu. Feminisme liberal mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan akses pada pendidikan, kebijakan yang bias gender, hak-hak politis dan sipil (2005 : 88-152).

Rochelle Gatlin (1987 : 121) menerangkan korelasi antara feminisme liberal dan perubahannya menjadi feminisme radikal. Ia mendefinisikan feminis liberal adalah kaum liberal yang potensial. Akan tetapi banyak liberalis yang tidak menyadari hal ini dan menyangkal bahwa liberalisme yang mereka

dukung adalah sebuah ideologi politis seperti lainnya. Mereka sering tidak sadar bahwa nilai-nilai liberal dari hak-hak individual dan kesetaraan kesempatan sesungguhnya berkontradiksi dengan pengakuan feminis mereka bahwa perempuan adalah sebuah kelas seks yang kondisi umumnya ditentukan secara sosial dan bukan secara individual.

2) Feminisme Radikal

Menurut Arivia (2005 : 100-102), inti gerakan feminis radikal adalah isu mengenai penindasan perempuan. Mereka mencurigai bahwa penindasan tersebut disebabkan oleh adanya pemisahan antara lingkup privat dan lingkup publik, yang berarti bahwa lingkup privat dinilai lebih rendah daripada lingkup publik, dimana kondisi ini memungkinkan tumbuh subur patriarki. Dalam konsep feminisme radikal, tubuh dan seksualitas memegang esensi yang sangat penting. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa penindasan diawali melalui dominasi atas seksualitas perempuan dalam lingkup privat. Kaum feminis radikal meneriakkan slogan bahwa “yang pribadi adalah politis”, yang berarti penindasan dalam lingkup privat adalah merupakan penindasan dalam lingkup publik.

Feminis radikal memberikan prioritas pada upaya untuk memenangkan isu-isu tentang kesehatan, misalnya perdebatan mengenai aborsi dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Mereka ingin menyadarkan perempuan bahwa “perempuan adalah pemilik atas tubuh mereka sendiri”, mereka memiliki hak untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh mereka, termasuk dalam hal kesehatan dan reproduksi.

Para feminis radikal juga memberi perhatian khusus pada isu tentang kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Dominasi laki-laki dalam sistem patriarki membuat kekerasan yang menimpa perempuan, seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, pelecehan seksual, menjadi tampak alami dan “layak”. Sejalan dengan pemahaman ini, tercipta pula dikotomi mengenai *good girls* dan *bad girls*. Apabila seorang perempuan berperilaku baik, terhormat, dan patuh, maka ia tidak akan dicelakai (2005 : 103).

Mengingat bahwa dalam sistem patriarki laki-laki yang memegang kendali kekuasaan dan dominasi, maka adalah juga laki-laki yang *berhak* memberikan definisi mengenai perilaku yang “dapat diterima” dan “pantas”, atau dengan kata lain, seorang perempuan harus bertindak tunduk dalam suatu pola perilaku untuk memenuhi cita rasa laki-laki dan untuk menyenangkan mereka agar memperoleh posisi yang aman dan nyaman. Dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang demikian, terdapat suatu pola superordinat - subordinat, pengampu-diampu, suatu target yang sangat ingin dihapuskan oleh feminis radikal.

Selanjutnya, terdapat perpecahan dalam feminis radikal, yaitu radikal libertarian dan radikal kultural. Feminisme radikal libertarian memberikan perhatian lebih pada konsep isu-isu feminin, pada hak-hak reproduksi dan peran seksual. Menurut kelompok ini, solusi atas masalah ini adalah dengan mengembangkan ide androgini, yaitu sebuah model yang mempromosikan

pembentukan manusia seutuhnya dengan karakteristik maskulin - feminin (2005 : 108).

Di lain pihak, feminis radikal kultural bersikeras pada proposisi yang menyatakan bahwa perempuan seharusnya tidak seperti laki-laki, dan tidak perlu bagi perempuan untuk berperilaku seperti laki-laki. Kaum feminis radikal kultural mencegah penerapan nilai-nilai maskulin yang secara kultural dikenakan pada pria, misalnya kebebasan, otonomi, intelektual, kehendak, kirarki, dominasi, budaya, transendensi, perang dan kematian.

Perbedaan antara feminisme radikal libertarian dengan feminisme radikal kultural mengungkapkan adanya perbedaan sudut pandang yang tajam antara keduanya mengenai reproduksi. Dimana pertentangannya memperdebatkan apakah reproduksi merupakan sumber “penindasan perempuan atau “kekuatan perempuan” (2005 : 109). Meskipun demikian, terdapat satu hal yang mengikat ide radikal feminisme, yaitu pada pemahaman dasar bahwa sistem gender adalah basis dari penindasan perempuan. Feminis mengangkat isu-isu tentang seksisme, patriarkhi, hak-hak reproduksi, kekuatan hubungan laki-laki dan perempuan, dikotomi antara ranah privat dan ranah publik.

Arivia (2005 : 152) menyatakan bahwa terdapat berbagai kritik terhadap feminisme radikal bahwa ide telah terperangkap pada anggapan bahwa pada dasarnya perempuan lebih baik daripada laki-laki, dan bahwa ideologi juga tereduksi menjadi dikotomi antara laki-laki dan perempuan.

3) Feminisme Marxis dan Sosialis

Meskipun terdapat sejumlah persamaan antara feminisme Marxis dan sosialis, akan tetapi antara keduanya terdapat perbedaan yang tegas. Feminis sosialis menekankan bahwa penindasan gender disamping penindasan kelas adalah merupakan sumber penindasan perempuan. Sebaliknya, feminis Marxis berargumentasi bahwa sistem kelas bertanggungjawab terhadap diskriminasi fungsi dan status.

Feminis Marxis percaya bahwa perempuan *borjuis* tidak mengalami penindasan seperti yang dialami perempuan proletar. Penindasan perempuan juga terlihat melalui produk-produk politik, struktur sosiologis dan ekonomis yang secara erat bergandengan tangan dengan sistem kapitalisme. Seperti halnya Marxisme, feminis Marxis memperdebatkan bahwa eksistensi sosial menentukan kesadaran diri. Perempuan tidak dapat mengembangkan dirinya apabila secara sosial dan ekonomi tergantung pada laki-laki. Untuk mengerti tentang penindasan perempuan, relasi antara status kerja perempuan dan citra diri mereka dianalisa.

Feminis Marxis ataupun sosialis mencuatkan isu pada kesenjangan ekonomi, hak milik properti, kehidupan keluarga dan domestik di bawah sistem kapitalisme dan kampanye tentang pemberian upah bagi pekerjaan-pekerjaan domestik. Gerakan ini dikritik karena hanya melihat relasi kekeluargaan yang semata-mata eksploitasi kapitalisme, dimana perempuan memberikan tenaganya secara gratis. Feminis Marxis dan sosialis mengabaikan unsur-unsur cinta, rasa aman dan rasa nyaman, yang padahal juga berperan penting dalam pembentukan sebuah keluarga. Ideologi ini hanya menekankan fokus

pada eksploitasi dalam kapitalisme dan ekonomi. Bukan memberi perhatian lebih pada masalah gender, justru berkonsentrasi pada analisis kelas (2005 : 152).

Menurut Rosemary Hennesy dan Chrys Ingraham (1997 : 4), feminisme Marxis dan sosialis melihat budaya sebagai suatu arena produksi sosial, arena dimana feminis berjuang daripada melihat budaya sebagai suatu kehidupan sosial secara keseluruhan.

4) Feminisme Eksistensialisme

Simone de Beauvoir (dalam Arivia, 2003 : 122-123) menyatakan bahwa dalam feminisme eksistensialisme penindasan perempuan diawali dengan beban reproduksi yang harus ditanggung oleh tubuh perempuan. Dimana terdapat berbagai perbedaan antara perempuan dan laki-laki, sehingga perempuan dituntut untuk menjadi dirinya sendiri dan kemudian menjadi “yang lain” karena ia adalah makhluk yang *seharusnya* di bawah perlindungan laki-laki, bagian dari laki-laki karena diciptakan dari laki-laki. Dengan demikian, perempuan didefinisikan dari sudut pandang laki-laki, sehingga laki-laki adalah subjek dan perempuan adalah objeknya atau “yang lain”.

Teori terdahulunya adalah teori Jean Paul Sartre yang menyatakan bahwa ada tiga jenis eksistensi atau keberadaan, yaitu *etre ens soi* (ada pada dirinya), *etre pour soi* (ada bagi dirinya) dan *etre pour les autres* (ada untuk orang lain).

Konflik menurut teori ini adalah inti dari hubungan antar subjek, sehingga hubungan antara individu juga berdasarkan pada konflik (2003 : 71-76).

Argumentasi ini sejalan dengan ide Shulamith Firestone dalam bukunya yang berjudul *The Dialectic of Sex : The Case for Feminist Revolution* (dalam Arivia, 2003 : 67-68), dimana ia mengklaim bahwa beban reproduksi dan tanggungjawab untuk merawat anak membawa perempuan dalam posisi tawar yang rendah terhadap laki-laki.

5) Feminisme Psikoanalitis

Feminisme psikoanalitis mendasarkan teorinya pada pemahaman bahwa alasan dasar bagi penindasan perempuan terletak pada kejiwaan perempuan. Phyllis Chesler dalam tulisannya yang berjudul *Women and Madness* (1972) menyatakan bahwa sakit kejiwaan perempuan kemungkinan adalah hasil dari pengkotak-kotakkan peran gender atau dampak dari masyarakat yang terkondisi berdasarkan jenis kelamin, maka sebagai konsekuensinya seorang perempuan akan dicap tidak waras apabila ia tidak berperilaku sesuai dengan label yang diberikan masyarakat kepadanya. Kondisi depresif yang diderita perempuan mengarahkan pada kekurangwarasan dan sakit jiwa ini kemudian dibakukan dalam bentuk depresi, upaya bunuh diri, neurotis kecemasan, paranoia, lesbianisme, dan sebagainya. Dalam situasi ketika perempuan berlawanan dengan standar yang berlaku, maka ia akan dilihat sebagai neurotis atau psikotis (2003 : 230). Misalnya, seorang perempuan akan dianggap aneh jika ia berperilaku kritis, tegas, dan vokal dalam suatu masyarakat yang menuntut seorang perempuan untuk patuh, pasrah, dan diam. Nancy Chorodow dalam *The Reproduction of Mothering* (1978) mengungkapkan fakta bahwa kecenderungan dominasi laki-laki terhadap

perempuan sesungguhnya berakar dari fase bayi. Baik anak perempuan maupun laki-laki mengidentifikasikan dirinya dengan ibu karena ikatan mental dan fisik dengan ibunya. Seiring pertumbuhannya, seorang perempuan kehilangan kedekatan dan ikatannya dengan ibu, dan menggantikannya dengan ayah, kemudian dengan lawan jenisnya. Proses ini tidak membawa dampak yang sangat besar bagi perempuan, karena ia tetap memiliki feminitas ibunya dan juga hubungannya dengan ayahnya. Sebaliknya bagi laki-laki, proses ini berdampak besar karena ia harus menekan pengidentifikasiannya dengan ibunya agar ia seperti ayahnya secara utuh. Hal ini berbeda dari perempuan yang relasinya dengan sang ayah merupakan relasi tambahan, sedangkan relasi laki-laki terhadap ayah adalah relasi pengganti. Dengan demikian, dalam hubungan sosialnya, seorang perempuan lebih suka berkelompok dan penuh kasih sayang daripada laki-laki karena kedekatannya dengan sang ibu terus berlangsung. Kebalikannya, seorang laki-laki cenderung merasa terpenjara dalam hubungannya dengan orang lain.

6) Feminisme Posmodern

Mirip dengan teori eksistensialisme, dalam feminisme posmodern perempuan juga dianggap sebagai “yang lain”. Seorang perempuan teralienisasi karena cara berpikirnya, cara keberadaannya, dan bahasa perempuan yang menghalangi terciptanya keterbukaan, pluralitas, diversifikasi dan perbedaan. Dengan memandang pada bahasa sebagai sebuah sistem, feminis posmodern mencoba untuk menguak teralienisasinya perempuan dalam seksualitas, psikologi dan sastra (Arivis, 2003 : 128).

Jacques Lacan menjelaskan bahwa *the Symbolic Order*, yaitu seperangkat peraturan simbolis, atau juga disebutnya sebagai *the Law of Father* memegang peranan penting dalam konstruksi masyarakat. Menurutnya, peraturan simbolis yang sangat maskulin ini adalah sumber kesulitan perempuan mengingat bahwa secara anatomi seorang perempuan berbeda dengan ayahnya. Dengan demikian, perempuan mengalami kesulitan dalam pengidentifikasian diri terhadap ayahnya yang laki-laki dan maskulin. Penindasan perempuan diawali pada saat perturan simbolis yang diekspresikan melalui bahasa dan cara berpikir yang maskulin (2003 :129).

7) Ekofeminisme

Mary Daly (1978 : 8) mengingatkan perempuan untuk waspada terhadap metode-metode mistifikasi laki-laki. Ia mengklasifikasikan mistifikasi ini ke dalam empat cara, yaitu penghapusan (*erasure*), pembalikan (*resersal*), polarisasi yang salah (*false polarization*) serta memecah belah dan menaklukkan (*divide and conquer*). Metode penghapusan terlihat dari adanya penghapusan fakta pembunuhan jutaan perempuan yang disangka sebagai tukang sihir dalam pengetahuan patriarki. Metode pembalikan tercermin dalam mitos-mitos yang patriarki, misalnya Adam-Hawa, Zeus-Athena. Metode polarisasi yang salah terimplikasi dalam feminisme menurut definisi laki-laki yang dipertentangkan dengan seksisme menurut definisi laki-laki dalam media patriarki. Sedangkan metode memecah belah dan menaklukkan terimplementasi dalam bentuk adanya perempuan rendah yang dilatih untuk ‘membunuh’ feminis dalam profesi yang patriarkhis.

Selanjutnya Daly menegaskan bahwa budaya maskulin membawa degradasi bagi kemanusiaan, dalam pemahaman bahwa sistem patriarki yang mengagungkan kekuasaan, eksploratif, destruktif dan menguasai. Apabila sistem patriarki dipertentangkan dengan sistem matriarki yang lembut, kebersamaan dan menyayangi, maka alam akan terjaga dan lestari dalam sistem matriarki.

Menurut Susan Griffin (dalam Arivia, 2003 : 146), perempuan mempunyai kemampuan terhadap pelestarian alam karena pada dasarnya perempuan mencintai kelangsungan hidup dan bukannya kematian. Perempuan adalah yang melahirkan anak, maka ia mengenal betul arti kehidupan.

8) Feminisme Lesbian

Esensi dari lesbianisme adalah politik, karena ideologi ini mengkritisi supremasi laki-laki melalui lembaga dan ideologi yang heteroseksual. Charlotte Bunch menyajikan perbedaan yang jelas antara lesbian dan perempuan murni, lesbianisme menekankan keterikatan perempuan terhadap perempuan, sementara heteroseksual menekankan keterikatan perempuan terhadap laki-laki (dalam Hennessy, 1997 : 55).

Dalam heteroseksual, laki-laki menikmati hak-hak istimewa yang lebih tinggi. Sebaliknya perempuan dianggap sebagai suatu bentuk properti laki-laki. Tubuhnya, pelayanannya, dan anak-anaknya menjadi milik laki-laki. Kenyataan ini memicu sejumlah perempuan untuk mendobrak sistem patriarki - konvensional dan mengembangkan suatu gaya hidup baru dengan karakter yang sarat budaya feminin, yaitu lesbianisme yang kontroversial.

Freedman dkk (dalam Humm, 1992 : 163) mengatakan bahwa lesbianisme lebih terbentuk oleh keterkaitan ideologi dan politik, seperti halnya praktek seksual. Dalam pengertian ini, lesbianisme bukan hanya terbatas pada aktivitas seksual saja, melainkan juga mungkin meliputi konsep sosiopolitik dari suatu komunitas.

Daly (1978) mengatakan bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan terentang dalam sepanjang abad dan segala budaya. Sistem patriarki *melembagakan* penindasan perempuan termasuk kekerasan seksual atau “sado-ritual”, seperti budaya pengikatan kaki (agar memiliki bentuk tertentu), mutilasi genital perempuan, *suttee* di India, pembakaran tukang sihir perempuan dan ginekologi.

E. Kesimpulan

Sejarah pembedaan antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan dan konstruksi sosial kultural, keagamaan, bahkan melalui kekuasaan negara. Melalui proses yang panjang, gender lambat laun menjadi seolah-olah kodrat Tuhan atau ketentuan biologis yang tidak dapat diubah lagi. Akibatnya, gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana lelaki dan perempuan berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut.

Pandangan mengenai perspektif gender ini mengalami perdebatan teoritis, dimana apabila ditilik dari perspektif ekonomi, subordinasi kedudukan perempuan yang berada di bawah laki-laki dikatakan berakar pada ketergantungan

ekonomi. Menurut perspektif politis, karena perempuan tidak memiliki kendali atas properti dan alat produksi, maka perempuan tidak memiliki akses untuk berpartisipasi dalam ranah politik. Berbeda pula menurut perspektif budaya bahwa budaya secara kental dipengaruhi oleh etika agama, yang mengakibatkan kedudukan dan peran perempuan juga turut terbentuk dengan mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama dalam sebuah negara.

Daftar Pustaka

- Anderson, Margaret L., *Thinking About Women : Sociologist and Feminist Perspectives*, Macmillan, New York, 1983.
- Arivia, Gadis. *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003.
- Daly, Mary, *Gyn/Ecology : The Metaethics of Radical Feminism*, Beacon, Boston, 1978.
- Evans, Sara M. *Born for Liberty : A History of Women in America*, Volume 2, 1994.
- Friedman, Milton, *Capitalism and Freedom*, The University of Chicago Press, Chicago, 1982.
- Gatlin, Rochelle, *American Women Since 1945*, Macmillan, Houndmills, 1987.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, UMM Press, Malang, 2006.
- Haralambos, Michael dan Robin Heald, *Sociology Themes and Perspectives*, University Tutorial Press, Slough, 1980.
- Hennessy, Rosemary dan Chrys Ingraham, *Materialist Feminism : A Reader in Class, Difference and Women`s Lives*, Routledge, New York, 1997.
- Hollinger, David A. dan Charles Capper, *The American Intellectual Traditions*, Volume 2, Oxford University Press, New York, 2001.

Lerner, Gerda, *The Creation of Patriarchy*, Oxford University Press, New York, 1986.

Nope, Marselina C.Y., *Jerat Kapitalisme atas Perempuan*, Cetakan Pertama, Resist Book, Yogyakarta, 2005.

Wallace, Tina dan Candida March, *Changing Perceptions : Writing on Gender and Development*, Oxfam, Oxford, New York, 1991.

Yayasan Jurnal Perempuan dan The Asia Foundation, *Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2000.